

Sinergitas Pendidikan Vokasi, Pemerintah dan Dunia Usaha-Dunia Industri dalam Menyongsong Merdeka Belajar

Rizal Syahyadi

*Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA*

rizal_syahyadi@pnl.ac.id (penulis korespondensi)

Abstrak— Salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada pendidikan tinggi vokasi adalah kreativitas dan inovasi. Saat ini kreativitas dan inovasi telah menjadi hal penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan Indonesia unggul dimasa depan. Para mahasiswa yang saat ini melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi vokasi, harus disiapkan menjadi lulusan yang terampil dan berivensi. Kebijakan merdeka belajar - kampus merdeka yang ditetapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan merupakan sebuah kebijakan yang tepat untuk menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang kreatif, inovasi, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui permendikbud no 3 tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, maka bisa memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk berkreativitas serta memperkaya wawasan sehingga kompetensinya relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan vokasi seperti politeknik merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan lulusan siap bekerja. Secara khusus, program pendidikan vokasi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja tertentu sehingga dapat langsung diserap sebagai tenaga kerja di industri/swasta, lembaga pemerintah atau berwiraswasta secara mandiri. Kebijakan merdeka belajar - kampus merdeka pasti akan dapat berjalan optimal bila pemerintah, industri, dunia usaha-dunia industri (IDUKA) mampu bersinergi serta mendukung dalam mewujudkan hal tersebut.

Kata kunci— pendidikan vokasi, merdeka belajar, IDUKA.

Abstract— One of the important things in an effort to improve the quality of human resources (HR) in vocational higher education is creativity and innovation. Today, creativity and innovation have become essential to ensure Indonesia's sustainable development excels in the future. Students who are currently continuing their education at vocational tertiary institutions must be prepared to become graduates who are skilled and have the highest interest. The policy of independent learning - an independent campus established by the minister of education and culture is the right policy to prepare students to become graduates who are creative, innovative, and relevant to the needs of the times. Through Permendikbud No. 3 of 2020, it gives students the right to study 3 semesters outside their study program. Through this program, it can provide wide opportunities for students to be creative and enrich their insights so that their competences are relevant to the needs of the times. Vocational education such as polytechnics is higher education that prepares graduates to be ready to work. In particular, the vocational education program is aimed at producing graduates who have mastered abilities in certain fields of work so that they can be directly absorbed as workers in industry / private sector, government institutions or as self-employed entrepreneurs. The policy of independent learning - an independent campus will certainly run optimally if the government, industry, business world-industry (IDUKA) are able to synergize and support in realizing this.

Keywords— vocational education, free learning, IDUKA

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, pemerintah perlu untuk melakukan pembenahan pada pendidikan tinggi terutama pada pendidikan tinggi vokasi di Tanah Air, demi terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. SDM yang berkualitas hanya dapat dibentuk melalui pendidikan yang berkualitas. Manusia yang memiliki kompetensi akan siap bersaing di era globalisasi. Untuk itu, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat mampu menjalankan tugas dan fungsinya membangun manusia yang berkualitas sendiri, perlu adanya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam mewujudkan SDM berkualitas.

Perguruan tinggi vokasi selaku induk pendidikan vokasi di tanah air setiap tahunnya meluluskan alumni dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan link and match yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat.

Perguruan tinggi vokasi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif sehingga mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Masalah di pendidikan tinggi vokasi sesungguhnya muncul ketika untuk memenuhi tuntutan dari dunia usaha dan dunia industri terhadap kualitas lulusan yang siap kerja dan bukan sekedar siap training, Maka diperlukan penguatan keterampilan kerja yang lebih dibanding sekedar pemahaman teori atau ilmu pengetahuan saja. Hal tersebut menjadi masalah karena untuk mewujudkannya tentu tidaklah mudah. Pertama, mahasiswa harus memiliki waktu lebih banyak untuk praktek dan fleksibel dalam belajar dibanding hanya memahami teori di ruang kelas. Ini berarti bahwa kebutuhan akan sarana prasarana praktek sangat tinggi pada pendidikan vokasi.

Kebijakan merdeka belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar

yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Merdeka Belajar merupakan bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka juga diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam Merdeka Belajar merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat penting. Pembelajaran dalam Merdeka Belajar memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi terutama pendidikan tinggi vokasi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

II. METODE PELAKSANAAN

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu dan dapat menciptakan peluang kerja [1].

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan keahlian terapan yang diselenggarakan di perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas. Jenjang pendidikan vokasi sesuai dengan Undang Undang Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012 menempatkan jenjang pendidikan di mulai dari D-I, D-II, D-III, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan. Standar nasional pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Pendirian pendidikan vokasi memerlukan sarana praktik yang tidak sedikit dan murah, serta sumber daya manusia (guru, dosen, dan instruktur) yang mumpuni dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap santun agar mendapat dukungan dari pihak dunia usaha dunia industri sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Sehingga

diharapkan dapat mencetak calon tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, serta cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga mempunyai sikap kritis dalam menghadapi berbagai masalah. Untuk diperlukan tenaga pengajar dan instruktur yang memiliki keterampilan dan kreativitas yang tinggi untuk mengasah kemampuan analisis yang tinggi dari para siswanya.

Seperi diketahui pendidikan vokasional mempunyai muatan pembelajaran yang terdiri dari 70% praktik dan 30% teori yang berorientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Sehingga kurikulum pendidikan vokasional lebih menekankan pada pengembangan keahlian sesuai tuntutan dunia usaha dunia industri. Pendidikan vokasi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan keahlian terapan tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menghasilkan penelitian terapan dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat [2].

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan keahlian terapan yang diselenggarakan di perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas. Jenjang pendidikan vokasi sesuai dengan Undang Undang Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012 menempatkan jenjang pendidikan di mulai dari D-I, D-II, D-III, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan. Standar nasional pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

A. Kurikulum

Kurikulum adalah sejumlah kegiatan dan pengalaman belajar yang harus dilaksanakan peserta didik dalam arahan sekolah untuk mencapai kompetensi tertentu [3].

Kurikulum adalah dokumen yang tertulis yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran, oleh sebab itu kurikulum hendaknya dirancang sederhana, mudah dipahami dan sistematis. Oleh sebab itu kurikulum hendaklah diawali dengan spesifikasi kebutuhan siswa/mahasiswa, karena yang menjadi sasaran kurikulum adalah siswa/mahasiswa dan kurikulum dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, karena masyarakat yang akan menjadi pengguna lulusan [4].

Kurikulum vokasi mempunyai tujuan memberikan keahlian khusus bagi siswa/mahasiswa agar mereka dapat profesional dalam bidang ilmu yang mereka geluti. Seiring tuntutan keahlian yang harus dimiliki dalam dunia kerja mengalami perubahan begitu cepat, maka kurikulum harus menggambarkan pengalaman sesuai dengan tuntutan dunia usaha dunia industri.

B. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat di anggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu (SK Mendiknas 045/U/2002).

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai

sektor. pasal 29 UU Perguruan Tinggi disebutkan bahwa, KKNi atau IQF (Indonesia Qualification Framework) merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai struktur pekerjaan di berbagai sektor [2].

Keberadaan KKNi dan UU Perguruan Tinggi (PT) semakin memberikan angin segar bagi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Hadirnya KKNi membuat pendidikan vokasi semakin diakui dan sejajar dengan pendidikan akademik serta profesi. Ini momentum nasional bagi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi perubahan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk penyelenggaraan USBN pada 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas

tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang

fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya [5].

Pelaksanaan kemerdekaan belajar tidak membutuhkan infrastruktur atau anggaran yang besar. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membangun kemerdekaan belajar, sebagai berikut:

Pada skala nasional, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mengadakan survey aspirasi dan keterlibatan (engagement) mahasiswa dalam proses belajar di kampus. Setidaknya, dengarkan apa yang ingin dipelajari mahasiswa atau apa kondisi yang terbukti mendukung mahasiswa belajar lebih efektif. Hasil survey ini dijadikan umpan balik dan rekomendasi kepada para pelaku dalam ekosistem pendidikan.

Pada tingkat nasional dan daerah, tinjau kembali semua kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung membatasi kemerdekaan belajar. Pada lingkup daerah, pemerintah daerah melepaskan indikator capaian belajar siswa sebagai indikator untuk menilai kinerja sekolah dan dinas pendidikan daerah. Tumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab sekolah dan guru sebagai satuan pendidikan yang otonom.

Pada lingkup komunitas, adakan dan perbanyak kegiatan non kompetisi untuk mahasiswa seperti: forum bagi anak untuk menampilkan hasil karyanya. Dengan kegiatan non kompetisi, mahasiswa lebih merdeka mengekspresikan potensi dirinya tanpa harus takut kalah atau dipermalukan.

Pada lingkup kelas, guru dan orang tua dapat lebih banyak mengajukan pertanyaan pada mahasiswa untuk mendapatkan masukan dalam mengambil keputusan terkait proses belajar mereka. Beri stimulasi bacaan bermutu, beri kesempatan eksplorasi lingkungan sekitar, beri kesempatan menganalisis bacaan dan lingkungannya tersebut [6].

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa Merdeka belajar adalah kebebasan mutlak yang dimiliki oleh setiap mahasiswa yang diharapkan mampu mengarahkan pembelajaran ke depan yang lebih fokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Merdeka Belajar tentunya mampu merespon terhadap kebutuhan sistem pendidikan di era revolusi industri 4.0.

Di era revolusi industri 4.0 kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran yaitu mahasiswa dalam penguasaan terhadap literasi baru.

Penguasaan terhadap literasi baru oleh lulusan nantinya sangat dibutuhkan di dunia kerja sehingga lulusan nantinya siap menjadi tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tersebut dapat ditempuh melalui kurikulum yang link and match dan strategi pembelajaran yang produktif, serta didukung oleh dosen/instruktur yang kreatif.

Pencapaian kompetensi lulusan bisa juga dicapai dengan optimalisasi kerja sama dengan Pemerintah, Industri, Dunia usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) dan learning by doing in the teaching factory, sehingga akan menghasilkan calon tenaga kerja yang memiliki soft skills dan hard skills serta kemampuan berfikir kritis. Pendidikan vokasi akan menjadi sebagai pondasi bangsa menghadapi globalisasi dalam memecahkan masalah untuk menghadapi dunia kerja dalam era globalisasi.

REFERENSI

- [1] S. M. Metev and V. P. Veiko, *Laser Assisted Microtechnology*, 2nd ed., R. M. Osgood, Jr., Ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1998.
- [2] J. Breckling, Ed., *The Analysis of Directional Time Series: Applications to Wind Speed and Direction*, ser. Lecture Notes in Statistics. Berlin, Germany: Springer, 1989, vol. 61.
- [3] S. Zhang, C. Zhu, J. K. O. Sin, and P. K. T. Mok, "A novel ultrathin elevated channel low-temperature poly-Si TFT," *IEEE Electron Device Lett.*, vol. 20, pp. 569-571, Nov. 1999.
- [4] M. Wegmuller, J. P. von der Weid, P. Oberson, and N. Gisin, "High resolution fiber distributed measurements with coherent OFDR," in *Proc. ECOC'00*, 2000, paper 11.3.4, p. 109.
- [5] R. E. Sorace, V. S. Reinhardt, and S. A. Vaughn, "High-speed digital-to-RF converter," U.S. Patent 5 668 842, Sept. 16, 1997.
- [6] (2002) The IEEE website. [Online]. Available: <http://www.ieee.org/>
- [7] M. Shell. (2002) IEEEtran homepage on CTAN. [Online]. Available: <http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/IEEEtran/>
- [8] *FLEXChip Signal Processor (MC68175/D)*, Motorola, 1996.
- [9] "PDCA12-70 data sheet," Opto Speed SA, Mezzovico, Switzerland.
- [10] A. Karnik, "Performance of TCP congestion control with rate feedback: TCP/ABR and rate adaptive TCP/IP," M. Eng. thesis, Indian Institute of Science, Bangalore, India, Jan. 1999.
- [11] J. Padhye, V. Firoiu, and D. Towsley, "A stochastic model of TCP Reno congestion avoidance and control," Univ. of Massachusetts, Amherst, MA, CMPSCI Tech. Rep. 99-02, 1999.
- [12] *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specification*, IEEE Std. 802.11, 1997.